Bupati Irsyad Yusuf Akan Sanksi Tegas Kepala OPD Yang Tak Serius Tindak Lanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Senin, 16 Desember 2019

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh Kepala OPD terkait dengan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Ia menekankan pentingnya keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi, baik dari internal maupun eksternal, untuk menghindari pengulangan temuan yang sama. Irsyad mencontohkan temuan kekurangan volume dan keterlambatan pekerjaan fisik yang sering terjadi, dan ia akan memberikan sanksi tegas bagi kepala OPD yang lalai. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya diukur dari jumlah temuan, tetapi dari efektivitas tindak lanjut rekomendasi.

Irsyad menggarisbawahi pentingnya peran aktif kepala OPD dalam menuntaskan tindak lanjut rekomendasi, baik dari BPK maupun Inspektorat. Ia mengingatkan bahwa tidak menindaklanjuti rekomendasi merupakan pelanggaran hukum dan dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Plt Inspektur Kabupaten Pasuruan, Sunyono, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2019, Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap 73 objek, termasuk badan, OPD, kecamatan, secretariat daerah, dan desa. Ia juga menyampaikan rencana pemeriksaan di tahun 2020, yang meliputi pemeriksaan dengan tujuan tertentu, audit forensic, dan pembangunan sistem aplikasi terintegrasi.

Sunyono juga menyampaikan bahwa Inspektorat masih sering menemukan kelemahan dalam fungsi dan peran PA, KPA, PPKom, PPTK, dan PPHP. Terdapat temuan yang menjadi perhatian BPK, seperti pengelolaan pendapatan retribusi sewa tanah yang belum optimal dan penyaluran dana desa yang belum sesuai ketentuan. Sunyono berharap agar pengelolaan aset, seperti penatausahaan persediaan obat dan alat kesehatan, dapat lebih tertib dan efektif di masa mendatang.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.